

PUBLIC PARTICIPATION IN THE PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING

(A Study On Gender- Perspective Public Participation In Musrenbangkel Of 2020 In Kelurahan Lalolang)

Asriani

STIA Al Gazali Barru
asriani@algazali.ac.id

ABSTRACT

Musrenbangkel is the annual summit forum in arranging and establishing the priority scale list of development in kelurahan level prioritizing the public participation. In its implementation, Musrenbangkel is expected to give equal opportunity to the society, both male and female, to follow each stage. This research aims to find out the role and participation of women compared with the men in the process of Murenbangkel as well as to analyze the inhibitory factor of women's participation in Musrenbangkel. The research is a descriptive one supported with the qualitative and quantitative data. Techniques of collecting data used were in-depth interview and documentation study. The determination of informant was done using purposive sampling. The informant taken derived from the Kelurahan Lalolang party, the event organizer of Musrenbangkel, the participants of Musrenbangkel, public figure, as well as wide society, both women and men, selected based on the research interest and objective. The result of research shows that the 2020 Musrenbangkel organization in Kelurahan Lalolang has not been gender-responsive. The implementation of each stage of Musrenbangkel has not considered the women's interest. The 30% quota constituting the initial parameter to see the women's participation in Musrenbangkel is not achieved. Factors leading to the minimum participation of women including the women's lack of knowledge on Musrenbangkel, women's self concept, policy, women's willingness and

capability, as well as cultural inhibition and perception about gender. To cope with the women's minimum participation requires a new policy and a series of activities ensuring the implementation of gender-responsive Musrenbangkel. The procedure includes: to make the 30% quota of women in Musrenbangkel as the legitimate condition of Musrenbangkel implementation, to attempt a comprehensive socialization about the Musrenbangkel implementation in each society layers, and to give equal opportunity to all parties in each stage of Musrenbangkel. This procedure, if it can be accomplished, is expected to result in the Musrenbangkel implementation that takes both men's and women's needs into account.

Keywords: gender equality, participatory development, women's represe

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER DALAM MUSRENBANGKEL TAHUN 2020 DI KELURAHAN LALOLANG)

ABSTRAK

Musrenbangkel adalah forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan daftar skala prioritas pembangunan tingkat kelurahan yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Musrenbangkel diharapkan memberikan kesempatan yang sama pada setiap lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti setiap tahapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki dalam proses Musrenbangkel serta menganalisis faktor penghambat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penentuan informan diperoleh dengan teknik purposive sampling. Informan yang diambil berasal dari pihak Kelurahan Lalolang, panitia pelaksana Musrenbangkel, peserta Musrenbangkel, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih berdasarkan kepentingan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2020 di Kelurahan Lalolang belum responsif gender. Pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel belum memperhatikan kepentingan perempuan. Kuota 30% yang merupakan parameter awal untuk melihat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel tidak tercapai. Faktor-faktor penyebab minimnya partisipasi perempuan antara lain kurangnya pengetahuan perempuan tentang Musrenbangkel, konsep diri perempuan, kebijakan, kemauan dan kemampuan perempuan, serta hambatan budaya dan pemahaman mengenai gender. Untuk mengatasi minimnya partisipasi perempuan perlu dibuat suatu kebijakan baru

dan serangkaian kegiatan yang menjamin pelaksanaan Musrenbangkel bisa responsif gender. Langkah-langkah tersebut antara lain: menjadikan kuota 30% perempuan dalam Musrenbangkel sebagai syarat syah atau tidaknya pelaksanaan Musrenbangkel, mengupayakan sosialisasi yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Musrenbangkel pada setiap lapisan masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam tiap tahapan Musrenbangkel. Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa mewujudkan Musrenbangkel yang memperhatikan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.

Katakunci: perempuan, pembangunan, partisipatif, persamaan, gender

A. PENDAHULUAN

Manajemen pemberdayaan masyarakat atau komunitas menjadi sangat penting dalam proses pembangunan partisipatif ini. Proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Terkait dengan hal itu maka digulirkanlah suatu model perencanaan pembangunan partisipatif yang kemudian dikenal dengan istilah Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) di tingkat kelurahan, Musrenbangcam (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan) pada tingkat

kecamatan, dan Musrenbangkabupaten. Musrenbangkel maupun Musrenbangcam mengutamakan partisipasi dan peran serta warga daerah dalam proses perencanaan dan penetapan suatu rancangan pembangunan di daerah mereka. Dengan adanya musyawarah-musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif warga daerah tersebut diharapkan selain pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan aspirasi warga dan aparat daerah, selain itu masyarakat juga mendapat pendidikan politik di tingkat dasar dan lebih diberdayakan dalam artian ikut berpartisipasi aktif tidak hanya sebagai pelaksana saja.

Persoalan pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan gender ini dalam perkembangannya banyak menjadi persoalan sosial yang serius. Karena dalam penerapannya telah melahirkan praktek-praktek ketidakadilan (*gender inequalities*) yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti proses pemiskinan ekonomi, sub ordinasi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip dengan label negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang, dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan itu sebenarnya saling mengkait

dan tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. (Mansour Fakih, 2004: 12-13)

Keterkaitan antara ketidakadilan gender dan partisipasi perempuan bisa dikatakan sangat erat. Persoalan perbedaan peran perempuan dalam lingkup ruang publik dan ruang domestik bisa dikatakan adalah faktor utama dalam hal ini kaitannya dengan minimnya partisipasi mereka dalam Musrenbangkel. Faktor bias gender yang disebabkan budaya patriarki yang sudah mengakar di lingkungan masyarakat kita bisa dijadikan analisis awal untuk menjawab mengapa partisipasi perempuan sangat minim khususnya dalam proses Musrenbangkel dan umumnya dengan berbagai aktifitas dalam lingkup ruang publik yang berkaitan dengan masyarakat luas.

Fenomena minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel, dan dampak langsung dari fenomena tersebut dengan pembangunan yang akan di lakukan di daerah terkait adalah bahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan mengambil sampel Kelurahan Lalolang secara sempit, diharapkan muncul penyebab-penyebab yang bersifat dasar mengenai minimnya partisipasi perempuan dalam proses Musrenbangkel tersebut. Kelurahan Lalolang menjadi bahan yang menarik dijadikan sampel karena

pemimpin tertinggi dalam wilayah ini dalam hal ini adalah Lurah Kelurahan Lalolang adalah perempuan. Dengan dipimpin oleh perempuan apakah aspirasi perempuan bisa mengemuka dan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Lalolang. Oleh karena hal tersebut penulis mengangkat fenomena ini sebagai bahan penelitian, karena langsung ataupun tidak langsung dampak dari fenomena ini akan dirasakan oleh perempuan itu sendiri secara khusus dan semua warga Kelurahan Lalolang umumnya.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe/Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 1996:63). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang diimplementasikan dalam program Musrenbangkel di Kelurahan Lalolang yang berperspektif gender.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang dipeoleh langsung dari informan melalui wawancara secara langsung ataupun tidak langsung. Data dalam penelitian ini didapat dari narasumber yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbangkel ini antara lain: aparat Kelurahan Lalolang, anggota LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Lalolang, peserta Musrenbangkel, serta kaum perempuan di wilayah Kelurahan Lalolang seperti ibu rumah tangga, pengurus PKK Kelurahan, Pengurus PKK RT, Pengurus Organisasi dan perempuan yang mengikuti kegiatan Musrenbangkel Tahun 2007.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mengutip sumber-sumber sekunder melalui dokumen, buku-buku, arsip, hasil penelitian, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah data representasi perempuan dalam proses Musrenbangkel baik sebagai peserta maupun panitia.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Data dikumpulkan dari dokumen-dokumen di kantor Kelurahan Lalolang dan beberapa kantor pemerintah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan berupa representasi perempuan dalam prose Musrenbangkel, peraturan-peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan Musrenbangkel, serta kebijakan-kebijakan lain yang masih terkait

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat "*open ended*" dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan untuk menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang meliputi tiga Lingkungan utama yaitu Palanro, Pekkae, dan Padaelo.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Musrenbangkel adalah salah satu bentuk implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Musrenbangkel diarahkan sebagai sebuah forum musyawarah di tingkat kelurahan sebagai subsistem perencanaan kota yang dapat mempertemukan berbagai pihak dan komponen masyarakat untuk berembuk mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat serta berusaha memecahkan dan mencari solusi dari berbagai masalah yang ada. Dalam forum musyawarah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota

mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Musrenbangkel sebagai sarana untuk menampung aspirasi semua warga kelurahan terkait pelaksanaan pembangunan di wilayahnya mempunyai target-target yang harus dicapai. Target utama Musrenbangkel adalah menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tahunan di tingkat kelurahan dan rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangkel. Disamping target utama tersebut, Musrenbangkel juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan memiliki masyarakat pada pembangunan di wilayahnya. Musrenbangkel dapat menjadi sarana awal membentuk masyarakat yang partisipatif. Selain dua hal tersebut isu pemberdayaan perempuan dalam kerangka pengarusutamaan gender di wilayah kelurahan juga menjadi salah satu target khusus dari pelaksanaan Musrenbangkel. Perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat dan sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan di wilayahnya sangat diperlukan keterlibatannya dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Musrenbangkel dapat menjadi sarana pembelajaran perempuan ketika dituntut berhubungan dengan wilayah publik.

Partisipasi perempuan merupakan salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Faktor-faktor di sekeliling perempuan seperti kebijakan yang mengatur Musrenbangkel, lingkungan, sosial budaya, atau kesadaran perempuan sendiri dalam mengikuti Musrenbangkel menjadi hal-hal yang bisa saja menjadi penghambat atau pendorong partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel. Untuk mengetahui besarnya partisipasi perempuan dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Musrenbangkel sudah responsif gender atau belum perlu adanya suatu analisis gender dalam tiap tahapan Musrenbangkel. Diharapkan dengan adanya analisis gender bisa diketahui seberapa besar partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel, dan bila ada faktor penghambatnya bisa diketahui serta tentu saja dicari pemecahannya.

Berdasar hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2020 di Kelurahan Lalolang belum sepenuhnya responsif gender. Pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel yang memperhatikan kepentingan perempuan belum terlaksanakan dengan baik. Kuota 30% yang merupakan parameter awal untuk melihat partisipasi perempuan dalam

pelaksanaan Musrenbangkel tidak tercapai. Peran laki-laki dalam tiap tahapan pelaksanaan Musrenbangkel masih terlihat dominan, hal tersebut dapat dilihat dalam komposisi panitia maupun peserta Musrenbangkel.

Mengenai pelaksanaan Musrenbangkel bila dilihat dari perspektif gender sendiri dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan Musrenbangkel yaitu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi pada tiap tahapan Musrenbangkel. Perempuan diberikan akses dan peran yang besar untuk dilibatkan dalam setiap bagian. Jadi perempuan tidak hanya jadi peserta saja tapi kesempatan perempuan untuk menjadi Panitia dalam pelaksanaan Musrenbangkel sangat terbuka lebar dengan adanya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Kekurangan pasal-pasal yang mengatur keterwakilan perempuan dalam tahapan Musrenbangkel adalah tidak adanya aturan yang mengatur apabila keterwakilan perempuan dalam tiap bagian tersebut tidak mencapai 30%. Dalam beberapa pasal tersebut kuota 30% bagi keterwakilan perempuan bukan kewajiban melainkan hanya diupayakan saja. Dengan kata-kata

diupayakan 30% tersebut tentunya sangat tidak mengikat. Hal tersebut tentu sangat berbeda bila kuota 30% menjadi syarat mutlak dan menjadi salah satu penentu syah atau tidaknya Musrenbangkel.

2. Pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2020 di Kelurahan Lalolang secara umum belum responsif gender. Tahapan Musrenbangkel yang bisa dibagi tiga yaitu penentuan undangan, penentuan panitia, dan kehadiran peserta Musrenbangkel belum memperhatikan kepentingan perempuan. Pada tahap penentuan undangan untuk menghadiri Musrenbangkel, keterwakilan perempuan tidak menjadi suatu keharusan ketika undangan yang disebarkan kepada tiap-tiap RT atau RW tidak ada pencantuman berapa porsi atau kuota perwakilan perempuan dalam delegasi yang mereka kirim ke rapat musrenbangkel. Wewenang penentuan perwakilan sepenuhnya menjadi hak pengurus Rt atau RW setempat. Selain hal tersebut keterwakilan perempuan 30% tidak diupayakan dengan mencari perwakilan perempuan sebanyak-banyaknya dari berbagai kepentingan angka 30% keterwakilan perempuan hanya diisi oleh anggota PKK saja.

Dalam penentuan susunan panitia pun kontrol perempuan dalam Musrenbangkel sangatlah kurang dikarenakan minimnya mereka sebagai panitia Musrenbangkel. Ditambah lagi posisi mereka juga membuat mereka tidak bakal bisa berbuat langkah-langkah nyata terkait kebutuhan mereka. Sedangkan dilihat dari kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel, seperti telah dikemukakan sebelumnya, undangan yang tidak menyebar ke seluruh elemen perempuan membuat partisipasi perempuan tidak maksimal. Dengan komposisi perempuan tidak mencapai angka 30% kemungkinan perempuan mampu memasukkan isu-isu tentang perempuan sangat sulit. Minimnya keterwakilan perempuan berdampak langsung pada hasil Musrenbangkel yang belum menyentuh usaha mewujudkan persamaan gender dalam lingkup kelurahan.

3. Dari fenomena minimnya partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yaitu antara lain:
 - a. Kurangnya pengetahuan perempuan tentang pelaksanaan Musrenbangkel Sosialisasi mengenai

pelaksanaan musrenbangkel belum sepenuhnya berjalan baik. Motivasi untuk mengikuti musrenbangkel dipastikan tidak ada karena memang tidak tahu tentang kegiatan yang akan dilakukan. Keadaan ini ternyata menimpa pada masyarakat luas tidak hanya pihak perempuan.

b. Konsep diri perempuan

Perempuan berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, karena merasa bukan dunia mereka, perempuan menjadi bersikap apatis dan menyerahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan ruang publik tersebut kepada pihak laki-laki.

c. Kemauan dan kemampuan perempuan

Terkait dengan kemauan dan kemampuan terkadang banyak perempuan yang tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk berkecimpung lebih dalam di ruang publik. Konsep diri seperti ini terbentuk karena mereka selama ini jarang

bersentuhan dengan ruang publik.

d. Kebijakan terkait Partisipasi Perempuan

Dalam pelaksanaannya ada ruang dalam pasal tersebut yang memungkinkan perempuan tidak mendapatkan porsi 30%. Kuota 30% tersebut tidak menjadi syarat mutlak sah nya suatu Musrenbangkel. Dan pengupayaan pencapaian kuota tersebut menjadi wewenang penuh pihak panitia.

e. Hambatan Budaya dan Pemahaman mengenai gender

Kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat membuat perempuan tidak bisa berbuat banyak bila bersinggungan dengan ruang publik. Perempuan hanya dikotakkan pada ranah domestik saja. Kurangnya pemahaman mengenai konsep gender pada masyarakat luas baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel baik sebagai peserta maupun ditunjuk sebagai panitia.

4. Musrenbangkel yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapannya tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan gender dalam hal ini kebutuhan gender pihak perempuan. Dengan mengetahui kebutuhan perempuan diharapkan semua pihak yang terkait pelaksanaan Musrenbangkel dapat mengambil sikap yang tepat agar pelaksanaan Musrenbangkel di masa datang jauh lebih optimal. Kebutuhan perempuan tersebut dapat dirumuskan dengan melihat temuan-temuan yang ada di lapangan terkait partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Beberapa kebutuhan praktis maupun strategis perempuan terkait keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangkel antara lain:

- a. Mendapat sosialisasi dan pengertian tentang arti pentingnya Musrenbangkel
- b. Mendapat Pelatihan Khusus
- c. Waktu pelaksanaan musrenbangkel yang berpihak pada perempuan
- d. Perlakuan yang sama

dalam tiap tahapan Musrenbangkel

- e. Hak Bicara dan Organisasi
- f. Pemberian kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih pada perempuan
- g. Penghapusan beban kerja rumahtangga berdasar jenis kelamin

Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2020 di Kelurahan Lalolang, maka perlu pemahaman yang mendalam mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kaitannya dengan analisis gender maka yang perlu diketahui pemahaman mengenai konsep dari gender. Pada dasarnya gender berbeda dengan jenis kelamin ternyata konsep gender belum dipahami secara jelas oleh masyarakat luar termasuk pelaksana program Musrenbangkel di Kelurahan Lalolang. Sehingga pelaksanaan Musrenbangkel masih jauh dari responsif gender.

Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat luas sehingga seolah-

olah secara substansial perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Pandangan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender Lima bentuk ketidakadilan gender yang ditemui dan menonjol dalam masyarakat adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, *violence*, dan

beban kerja ganda. Selain bentuk ketidakadilan gender tersebut budaya patriarki yang sangat kuat di dalam masyarakat mempengaruhi cara pikir perempuan. Akhirnya perempuan sendiri yang berfikir ruang domestik adalah dunia mereka dan ruang publik adalah dunianya laki-laki. Konsep diri yang sudah terbentuk seperti itu berpengaruh pada tingkat keaktifan mereka, dan akhirnya mempengaruhi partisipasi mereka bila dikaitkan dengan proses Musrenbangkel. Akibatnya, konsep pembangunan gender seperti yang diamanatkan oleh Inpres N0. 9 Tahun 2000 tentang PUG belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk mengatasi kesenjangan gender dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel.

2. Implikasi Metodologis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk dapat mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diperlukan deskripsi dan pembahasan yang terperinci mengenai setiap tahapan Musrenbangkel. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Penulis mengalami kesulitan mendapatkan responden perempuan yang mengikuti proses Musrenbangkel karena minimnya perempuan yang terlibat. Jadi responden yang diambil hanya terbatas beberapa orang saja. Selain itu keterbukaan responden ketika wawancara juga menjadi kendala tersendiri, karena beberapa responden adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Musrenbangkel. Hal ini dapat diatasi dengan mencari responden di luar struktur panitia pelaksana.

Karena penelitian ini untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel dilihat dari perspektif gender maka diperlukan analisis gender pada tiap tahapan Musrenbangkel. Analisis gender ini dilakukan pada tahap penentuan undangan, kepesertaan Musrenbangkel, dan penentuan susunan panitia Musrenbangkel.

3. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka perlu dibuat suatu kebijakan baru dan serangkaian kegiatan yang menjamin bahwa pelaksanaan Musrenbangkel berikutnya benar-benar bisa responsive gender. Langkah-langkah tersebut antara lain

- a. Menjadikan kuota 30% perwakilan perempuan dalam Musrenbangkel sebagai syarat mengikat syah atau tidaknya pelaksanaan Musrenbangkel
- b. Mengupayakan sosialisasi yang menyeluruh dan responsif gender mengenai pelaksanaan Musrenbangkel pada setiap lapisan masyarakat.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam tiap tahapan Musrenbangkel.

Dari serangkaian kebijakan dan langkah-langkah tersebut diharapkan pelaksanaan Musrenbangkel bisa benar-benar memperhatikan kebutuhan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

D. KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Karena penelitian ini untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel dilihat dari perspektif gender maka diperlukan analisis gender pada tiap tahapan Musrenbangkel. Analisis gender ini dilakukan pada tahap penentuan undangan, kepesertaan Musrenbangkel, dan penentuan susunan panitia Musrenbangkel.
- Partisipasi perempuan merupakan salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangkel. Faktor-faktor di sekeliling perempuan seperti kebijakan yang mengatur Musrenbangkel, lingkungan, sosial budaya, atau kesadaran perempuan sendiri dalam mengikuti Musrenbangkel menjadi hal-hal yang bisa saja menjadi penghambat atau pendorong partisipasi perempuan dalam mengikuti Musrenbangkel.
- Berdasar hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2020

di Kelurahan Lalolang belum sepenuhnya responsif gender. Pelaksanaan tiap tahapan Musrenbangkel yang memperhatikan kepentingan perempuan belum terlaksanakan dengan baik. Kuota 30% yang merupakan parameter awal untuk melihat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangkel tidak tercapai. Peran laki-laki dalam tiap tahapan pelaksanaan Musrenbangkel masih terlihat dominan, hal tersebut dapat dilihat dalam komposisi panitia maupun peserta Musrenbangkel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dody Sugiartoto, 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, Pendekatan Pembangunan Ngewongke Uwong*. Solo: IPGI Solo
- H. B Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Irwan Abdullah, 1999. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif no.1*. Yogyakarta : Media Wacana
- Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press
- Judy El-Bushra, 2006. *Rethinking gender and development practice for the twenty-first century*. *Gender and Development* Vol. 8, No. 1, March 2000
- Loekman Soetrisno, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment)
- Mansour Fakih, 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadjir Darwin, 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Nur Iman Subono, 2003. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Sylvia Walby, 2008. *Gender, Globalisation, and Democracy. Moving the goalposts: Gender and globalisation in the twenty-first century*
- Taliziduhu Ndraha, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Y. Slamet, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta: UNS